

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tuntutan berat yang dihadapi pembangunan dewasa ini adalah masalah kependudukan. Menurut Sutrisno Hadi, bahwa masalah kependudukan di Indonesia meliputi : jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan penduduk yang cepat, dan penyebarannya yang tidak merata (BKKBN ; 1982 : 46). Besarnya jumlah penduduk, karena laju pertumbuhannya yang begitu cepat, 2,13% pertahun (Supas : 1985). Dengan pertumbuhan seperti ini berarti hasil pembangunan akan habis terserap oleh mulut dan tubuh-tubuh yang begitu cepat membanyak, inventasi kecil, percepatan pembangunan menjadi impian belaka (Garnadi ; 1974 : 16). Pertumbuhan penduduk yang cepat sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, sangat merintangi perbaikan taraf hidup, kemajuan pendidikan, peningkatan kesehatan dan sanitasi, pengadaan perumahan dan alat-alat pengangkutan, peningkatan kebudayaan, kesempatan berekreasi dan untuk banyak negara merintangi pemberian pangan yang cukup kepada rakyat. Dengan perkataan lain cita-cita umat manusia untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik akan diganggu dan dibahayakan oleh pertumbuhan penduduknya.

Permasalahan penduduk juga digambarkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, serta upaya-upaya untuk penanggulangannya; sebagai berikut :

"Jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhannya

yang tinggi merupakan masalah yang perlu diatasi. Jumlah penduduk yang besar dapat merupakan modal pembangunan dan potensi bagi peningkatan pembangunan disegala bidang. Namun laju pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi serta jumlah penduduk yang terlalu besar dapat merupakan beban bagi pembangunan dan mengurangi hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh rakyat. Karena itu untuk mengurangi laju pertumbuhan sekaligus memanfaatkan jumlah penduduk yang besar bagi peningkatan pembangunan disegala bidang, langkah-langkah dibidang kependudukan perlu ditingkatkan dan dilaksanakan secara lebih terpadu. Usaha pengendalian pertumbuhan penduduk perlu diperluas dan diintensifkan melalui gerakan keluarga berencana nasional yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat mempercepat perwujudan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, ..." (TAP MPR dan GBHN : 43 - 44).

Program Keluarga Berencana Nasional, sebagai salah satu program untuk menanggulangi pertumbuhan penduduk adalah merupakan program pemerintah yang telah diberi tanggung jawab untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Dari sejak kelahirannya, sampai dengan saat ini (Kepres 64/1983) program KB Nasional telah menunjukkan suatu perkembangan yang pesat. Hal tersebut karena terdesak oleh tujuan yang akan dicapainya, yakni menurunkan angka kelahiran sebesar 50% pada tahun 1990, dari keadaan tahun 1970. Sedangkan tujuan jangka panjang atau tujuan normatif adalah terciptanya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS).

Melihat permasalahan penduduk, dan tujuan program Keluarga Berencana untuk menurunkan tingkat kelahiran. Hal tersebut mengacu kepada suatu teori yang telah dialami di negara Eropa pada abad 19. Teori tersebut adalah yang dinamakan "transisi demografi", yaitu teori yang menerangkan perubahan penduduk dari tingkat pertumbuhan

yang stabil tinggi (tingkat kelahiran dan kematian tinggi) ke tingkat pertumbuhan penduduk rendah (tingkat kelahiran dan kematian rendah)(LD FE - UI ; 1981 : 15).

Menurut teori tersebut pertumbuhan penduduk terbagi pada empat kategori, yaitu : Kategori pertama, angka kelahiran dan kematian tinggi, yang dikarenakan tidak terkendalinya kelahiran atau jumlah penduduk. Demikian pula angka kematian tinggi karena kelaparan, daya tahan tubuh kurang kuat, penyakit menular, karena belum diketemukan teknologi kesehatan. Kategori ke dua, angka kematian menurun akibat diperbesarnya anggaran kesehatan dan juga mulai adanya penemuan obat-obatan yang makin maju. Sementara itu angka kelahiran tetap pada tingkat yang tinggi. Sehingga mengakibatkan pertumbuhan penduduk meningkat dengan pesatnya. Kategori ketiga, angka kematian terus menurun tetapi tidak secepat pada periode ke dua. Angka kelahiran mulai menurun akibat dari pendidikan, peralatan kontrasepsi yang makin maju. Pada kategori empat, pada tingkat ini kelahiran dan kematian mencapai tingkat yang rendah dan pertumbuhan penduduk kembali stabil seperti kategori pertama. Perkembangan penduduk Indonesia dan upaya program KB nya, cenderung mengikuti pola ini, dan sekarang diperkirakan telah mencapai kategori tiga, sehingga pada akhir pelita V mencapai kategori empat.

Upaya untuk mencapai pertumbuhan penduduk stabil, telah ditempuh berbagai kebijaksanaan, strategi dan pendekatan yang telah dilaksanakan oleh program KB Nasional. Pendekatan kemasyarakatan adalah salah satu pendekatan.

dalam program KB Nasional, yaitu suatu usaha yang mempunyai titik perhatian untuk mendorong masyarakat mengambil tanggung jawab yang besar dengan memperhatikan tata nilai dan komponen-komponen yang hidup dan berlaku di masyarakat itu sendiri. "Pendekatan kemasyarakatan melalui mekanisme sosial kultural dalam masyarakat dan lebih mengembangkannya sampai ke tingkat keluarga"(Santoso S. Hamijoyo; 1988 : 7).

Dalam kaitan dengan ini Haryono Suyono, mengatakan :

"... pengembangan program yang berasal dari bawah dengan akar-akar yang kuat, di mana tugas dan dukungan dari atas makin lama makin konsepsional dan mengarah kepada kebutuhan yang sementara belum dipenuhi oleh masyarakat sendiri."(Haryono Suyono; 1978 : 33).

Semula kehadiran program KB Nasional di tengah-tengah masyarakat, diprakarsai, didorong dan digerakkan pemerintah, kemudian secara berangsur-angsur harus menjadi bagian kehidupan masyarakat. Akhirnya masyarakat itu sendiri yang mengelola dan melaksanakan program KB Nasional secara mandiri. Peran pemerintah selanjutnya dalam program KB Nasional lebih bersifat membimbing, mengatur dan mengayomi. Hal tersebut merupakan alih kelola program atau alih peran program KB Nasional kepada masyarakat, yang diharapkan masyarakat itu sendiri yang meneruskan atau mengelola dengan bimbingan dari pemerintah.

Alih kelola atau alih peran dimaksudkan adalah :

1. Bahwa "alih peran" mengandung pengertian edukasi dalam arti yang luas. Artinya merupakan suatu proses pembentukan sikap kemandirian masyarakat dalam peran serta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, melalui adanya inovasi teknologi.
2. "Alih peran" harus berdasarkan kesukarelaan, artinya proses alih peran harus disertai dengan rasa bangga, tanggung jawab dan mengandung sikap

- dan pengorbanan atau nilai perjuangan.
3. Bahwa "alih peran" merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan organisasi masyarakat, kelompok keluarga, dan individu agar lebih mandiri, dalam memenuhi program KB Nasional sebagai bagian integral dari kehidupannya.
 4. Bahwa "alih peran" merupakan proses yang terus menerus yang diupayakan agar supaya kemandirian yang sudah dibentuk tersebut dapat ditingkatkan dan dimanfaatkan (BKKBN ; 1985 : 5).

Konsep alih peran di atas pada hakekatnya adalah proses perubahan sosial dan akhirnya merupakan proses perubahan sikap dan prilaku individu maupun masyarakat dalam program KB Nasional.

Alih peran sebagai suatu proses perubahan sosial dan prilaku, telah mewujudkan berbagai partisipasi masyarakat dalam program KB Nasional. Bentuk partisipasi tersebut tercermin dengan berdirinya lembaga-lembaga masyarakat yang mengelola dan melaksanakan program KB Nasional. Lembaga-lembaga tersebut, seperti ; Pos KB Desa, Sub Pos KB Desa, Kelompok Akseptor, Posyandu, UPPKA, UPGK, dan sebagainya. Lembaga-lembaga inilah yang diharapkan pemerintah untuk mengelola dan melaksanakan program KB Nasional, sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sebagaimana dikatakan Haryono Suyono, bahwa "keberhasilan program KB Nasional adalah tergantung kepada keberhasilannya terpenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri." (Haryono Suyono; 1978 : 33).

Pos KB Desa atau secara nasional dinamakan PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa), adalah merupakan suatu wadah kegiatan masyarakat dalam program KB Nasional. Di Ketuai oleh seorang warga masyarakat ber-

dasarkan pemilihan dan kepercayaan masyarakatnya. "Tenaga sukarela yang berasal dari desa dan merupakan anggota masyarakat setempat yang dipercayakan untuk menunaikan tugas-tugas dalam kegiatan Keluarga Berencana Nasional"

(BKKBN ; 1981 : 1). Munculnya lembaga ini penting sekali untuk perkembangan dan pemasyarakatan program. Dikatakan oleh Masri Singarimbun, "salah satu pendekatan yang penting untuk memasyarakatkan Keluarga Berencana adalah pembentukan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)" (Kompas; 5 Juni 1989).

Ketua dari Pos KB Desa tersebut merupakan tenaga sukarela yang membantu keterbatasan dana, sarana dan tenaga dari pemerintah. Dengan berbagai pikiran, tenaga dan sarana yang dimiliki, mereka sumbangkan untuk kemajuan dan keberhasilan program KB Nasional. Keberhasilan dalam arti memasyarakatnya program KBN secara mandiri. Partisipasi nyata Ketua Pos KB Desa terutama dalam bentuk kegiatan dari mulai perencanaan, penggarapan, sampai dengan evaluasi dan laporan hasil kegiatan. Salah satu fungsi dan tugasnya yang dapat dipantau secara nasional, ialah membantu mendistribusikan alat kontrasepsi ke peserta KB aktif di desanya. Hal tersebut seperti diungkapkan Haryono Suyono, sebagai berikut :

Berkembang tumbuhnya PPKBD dan Paguyuban sampai ke setiap pedukuhan ini telah memberikan manfaat mempermudah pelayanan pemberian kontrasepsi kepada masyarakat yang sedang ber KB. Sehingga tidak lagi hanya menggantungkan pelayanan dari pusat kesehatan yang ada. Hal ini nampak dari hasil perkembangan saluran desa dalam pemberian distribusi Pil dan Kondom kepada peserta KB.

Secara nasional peran saluran desa dalam pemberian Pil cukup meningkat, sehingga sekarang ini lebih dari 75% seluruh pemberian Pil kepada masyarakat disalurkan melalui Pos KB Desa. (Haryono Suyono; 1983 : 7).

Selanjutnya peran Pos KB Desa, dikemukakan oleh Santoso

S. Hamijoyo, sebagai berikut :

Peran PPKBD atau Sub PPKBD ini nampak dari perkembangan pelayanan pemberian ulangan Pil dan Kondom kepada peserta KB yang terus meningkat. Secara nasional peran PPKBD dan Paguyuban KB ini sangat besar oleh karena ternyata lebih 80% pemberian Pil dan 65% seluruh pemberian Kondom kepada masyarakat disalurkan mereka. (Santoso S. Hamijoyo; 1988 : 15).

Selanjutnya Masri Singarimbun, dalam Kompas 5 Juni 1989 menambahkan, bahwa dalam Pelita III sebanyak kira-kira 70% dari sejumlah alat kontrasepsi Pil dan Kondom disalurkan melalui PPKBD dan Sub PPKBD. Kemudian di samping itu hasil penelitian Departemen Sosial, mengatakan bahwa di Jawa dan Bali pencapaian kesertaan yang cukup tinggi dalam kelembagaan program KB telah diambil alih tanggung jawabnya oleh masyarakat sendiri dengan terbentuknya kelompok-kelompok akseptor di tingkat desa dan pedukuhan (Depsos; 1982).

Program KB Nasional disebarkan ke masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi, atau dikenal dengan istilah KIE dalam lingkungan program KB Nasional. Dengan demikian hakekat tumbuhnya institusi masyarakat atau Pos KB Desa tersebut, adalah merupakan proses dan hasil pendidikan dalam arti luas. Pendidikan di sini dimaksudkan adalah Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh BKKBN, baik secara langsung melalui latihan-latihan maupun secara tidak langsung melalui penyuluhan-

penyuluhan dan pembinaan petugas di lapangan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sutaryat Trisnamansyah, bahwa :

Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah di Indonesia dalam kenyataannya tidak hanya dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saja, akan tetapi juga oleh departemen-departemen lain tertentu. Bahkan juga diselenggarakan juga oleh lembaga-lembaga swasta, organisasi-organisasi kemasyarakatan, perorangan, yaitu anggota-anggota masyarakat biasa.

Sebagian besar Departemen pemerintah memiliki program-program, yang walaupun tidak bisa disebut program pendidikan luar sekolah, namun pada hakekatnya mengandung inti pendidikan luar sekolah. Hal ini nampak dari tujuannya yang mengarah kepada perubahan pengetahuan, ketrampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai pada sasaran populasi, yaitu warga masyarakat, yang mengikuti pendidikan luar sekolah tersebut. (Sutaryat Trisnamansyah; 1987 : 9).

Aktivitas Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugasnya adalah suatu wujud nyata merupakan kegiatan pendidikan luar sekolah. Kegiatan ini seperti penerangan dan motivasi, pembinaan peserta KB, dan sebagainya. Tujuan dari ini semua adalah terjadinya perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam program KB Nasional, sehingga tumbuh kemandirian dalam program KB Nasional. Demikian pula bahwa tujuan Pendidikan Luar Sekolah pada dasarnya terjadi perubahan sikap, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat atau warga belajarnya. Berubahnya sikap berarti pula, timbul kemandirian dalam hidupnya. Begitu pula yang diharapkan oleh program KB Nasional terjadinya perubahan sikap, sehingga tumbuh kemandirian dalam mengelola dan melaksanakan program KB Nasional di lingkungan sekitarnya.

Sebagai hasil dari proses pendidikan, dewasa ini program KB Nasional telah mulai menjadi program masyarakat, karena telah menyangkut kebutuhan dan kepentingan

masyarakat di dalam kehidupannya. Oleh karena itu partisipasi masyarakat merupakan hal yang semestinya terjadi. Partisipasi, dimaksudkan adalah turut serta memikul dan bertanggung jawab akan keberhasilan pembangunan. Menurut Soeharsono, partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan harus semakin luas dan merata, baik dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan pembangunan atau pun pula di dalam menerima kembali hasil pembangunan (Soeharsono Sagir; 1982 : 13). Selanjutnya Margono Slamet, mengatakan pula bahwa partisipasi adalah ikut serta ambil bagian dalam suatu kegiatan dan ikut memanfaatkan serta menikmati hasil yang dicapai dengan persyaratan mesti adanya kemampuan dan kesempatan (Margono Slamet; 1982). Ambil bagian-nya Ketua Pos KB Desa dalam berbagai kegiatan telah terwujud dari mulai perencanaan, sampai pada laporan hasil kegiatan dari tingkat desa ke bawah. Dengan partisipasinya berarti pula suatu kenikmatan dan kepuasan tersendiri dalam kehidupannya.

Sumbangan Ketua Pos KB Desa yang dalam bentuk partisipasi ini, melibatkan berbagai pikiran, tenaga dan kadang-kadang berupa materi dan sarana yang diperlukan oleh program KB Nasional. Menurut Santoso S. Hamijoyo dan A. Iskandar, terdapat lima bentuk partisipasi, yaitu sebagai berikut :

1. Partisipasi buah pikiran yang diberikan partisipan dalam anjangsono, pertemuan atau rapat.

2. Partisipasi tenaga yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.
3. Partisipasi harta benda yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.
4. Partisipasi keahlian dan kemahiran, yang diberikan partisipan dalam kegiatan dan pembangunan.
5. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya turut arisan, koperasi, layad (dalam peristiwa kematian), nyambungan, mulang sambung. (Santoso S. Hamijoyo dan A. Iskandar; 1974 : 6).

Masyarakat berpartisipasi karena melihat suatu obyek yang menuntut partisipasi, kemudian adanya sikap dan kecenderungan untuk melibatkan diri terhadap obyek tersebut. Partisipasi akan terjadi dengan sendirinya apabila masyarakat itu sendiri telah meyakini suatu obyek tersebut, serta melihat akan manfaatnya. "Keputusan masyarakat untuk berpartisipasi, tidak hanya berdasarkan perintah Camat /Lurah, melainkan atas suatu keyakinan, pertama untuk dirinya sendiri dan keluarganya dan kemudian untuk rakyat dan negara" (Koentjaraningrat; 1984 : 81).

Sumbangan Ketua Pos KB Desa dalam bentuk partisipasi dalam program KB Nasional, atau melaksanakan tugas-tugas yang dibebankannya sebagai Ketua Pos KB Desa.

Seseorang yang mempunyai kesadaran dan dedikasi yang tinggi dalam hidupnya untuk kepentingan masyarakatnya. Sekalipun bekerja tanpa pamrih mempunyai dorongan yang kuat dalam bathinnya. Seseorang yang mempunyai kesadaran tinggi, biasanya orang tahu makna dan tujuannya, tahu akan manfaat yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya akan menimbulkan

minat dalam dirinya untuk berbuat yang berguna bagi masyarakatnya, kemudian bertindak atau mengambil bagian untuk melaksanakan apa yang seharusnya dikerjakan serta yang dipercayakan orang lain kepadanya.

Bentuk partisipasi nyata Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugasnya, dapat dilihat dari hasil observasi pada penelitian pendahuluan (dengan menggunakan alat), terhadap 100 orang Ketua Pos KB Desa (sampel dalam penelitian ini) selama satu bulan. Kegiatan yang mereka laksanakan dalam hubungannya dengan program KB Nasional, adalah ; penerangan dan motivasi program KB Nasional ke masyarakat di daerahnya rata-rata dilaksanakan (0,76%), pembinaan terhadap peserta KB Nasional (0,65%), pembinaan terhadap institusi masyarakat (0,56%), pendataan PUS dan Peserta KB Nasional (0,68%), mengikuti Rapat Koordinasi KB Desa (0,60%), mengikuti Minilokakarya KB/Kes (0,57%), dan membantu kegiatan Posyandu (0,67%).

Di samping itu jumlah jam yang mereka gunakan untuk kegiatan-kegiatan di atas, apabila dilihat dari rata-rata dalam setiap kegiatan, adalah ; penerangan dan motivasi program KB Nasional (2,12 jam), pembinaan peserta KBN (2,01 jam), pembinaan Institusi Masyarakat (2,16 jam), pendataan PUS dan peserta KB (2,36 jam), Rakor KB Desa (1,80 jam), Mengikuti Lokakarya (1,86 jam), dan membantu kegiatan Posyandu (2,10 jam). Lebih terinci jenis kegiatan tersebut dapat dilihat dari lampiran. Nampaknya kegiatan penerangan dan motivasi, pendataan dan Posyandu, mempunyai prosentase yang tinggi dibandingkan dengan ke-

giatan-kegiatan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan kebijaksanaan BKKBN Propinsi Jawa Barat, di mana pada tahun 1988/1989 sedang digalakkannya "Catur Krida Operasional Terkendali", atau disingkat "Cakot", inti kegiatannya meliputi; pendataan PUS dan peserta KB, penerangan/penyuluhan, dan pelayanan di Posyandu (H. Abdul Muchji; 1988 : 5).

Partisipasi Ketua Pos KB Desa itu terjadi, karena terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terhadap dirinya. Ketua Pos KB Desa ini merupakan orang pilihan di masyarakatnya, yang ditunjuk oleh masyarakatnya untuk melaksanakan program pemerintah. Pada umumnya orang-orang yang dipilih mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu dibandingkan dengan orang lain. Kelebihan ini terutama pada dedikasinya untuk berkorban demi kepentingan umum. Oleh karena yang utama diduga mempunyai motif berprestasi untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dalam penelitian ini pula akan diteliti sejauh mana pengaruh motif berprestasi Ketua Pos KB Desa terhadap kegiatannya dalam melaksanakan tugas. Di samping itu orang-orang yang mengemban tugas tertentu, harus dibarengi oleh informasi yang dimilikinya. Informasi dimaksudkan adalah pengetahuan yang dimilikinya. Dengan demikian adakah upaya untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya khususnya dalam program KB Nasional. Maka variabel berikutnya yang diduga mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas Ketua Pos KB Desa adalah komunikasi. Ketua Pos KB Desa adalah bekerja dengan sukarela untuk berbakti pada masyarakat dan negaranya, bekerja tanpa pamrih. Oleh karena apakah status sosial

ekonomi yang dimilikinya turut juga mempengaruhi terhadap kegiatannya dalam melaksanakan program KB Nasional. Menurut pendapat Keith Davis (1981 : 37), peranan seseorang dalam kelompok, juga banyak ditentukan oleh status sosial ekonominya. Variabel yang mempengaruhi yang ke tiga ini, adalah status sosial ekonomi, yang diteliti penulis.

Melalui penelitian ini, ke tiga faktor atau variabel independen, yaitu motif berprestasi, komunikasi dan status sosial ekonomi, diteliti mengenai sejauhmana pengaruhnya terhadap variabel dependen, yaitu Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugas program KB Nasional. Maka untuk lebih lengkapnya judul dalam penelitian ini, adalah : "Partisipasi Ketua Pos KB Desa dalam kegiatan program Keluarga Berencana Nasional". Sub judulnya, adalah suatu studi deskriptif tentang partisipasi Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugasnya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kabupaten DT II Tasikmalaya dan Ciamis.

B. Masalah Penelitian

Rintangan dan masalah yang dihadapi program KB Nasional cukup menonjol di masyarakat, walaupun dewasa ini nampaknya lebih lunak dibandingkan dengan tahun-tahun permulaan program. Menurut Maftuchah Yusuf (1985), hambatan-hambatan program KB Nasional, antara lain bersumber pada nilai dan norma masyarakat sebagaimana yang ditanamkan dalam hidupnya atau ajaran agama yang dianutnya, bersumber pada kepentingan politik, kepada kepentingan ekonomi dan bersumber pada psikologi sosial.

Walaupun dengan berbagai permasalahan yang dihadapi program KB Nasional, secara berangsur-angsur peran masyarakat sebagaimana dikemukakan di muka, mulai nampak, antara lain dengan tumbuhnya Pos KB Desa - Pos KB Desa pada setiap desa. Partisipasi Ketua Pos KB Desa telah cukup lama, telah banyak yang diperlihatkannya baik dalam pelayanan, pendistribusian alat kontrasepsi, pembinaan, maupun dalam penerangan dan motivasi.

Kepadanya pula telah diberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan melalui latihan - latihan program KB Nasional secara khusus. Setelah terjun ke lapangan secara rutin dibina oleh para petugas lapangan Keluarga Berencana, atau para petugas medis. Semua itu dengan harapan, bahwa Ketua Pos KB Desa dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

Namun kenyataan partisipasi dalam melaksanakan tugas tersebut sangat bervariasi, satu sama lain berlainan. Ada yang melaksanakan semua tugas, sebagian, hanya ikut-ikutan dan malahan ada yang tidak sama sekali. Begitu juga frekuensi kegiatan, ada yang tinggi, sedang, dan rendah.

Bervariasinya Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugas program KB Nasional, adalah karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut, baik yang bersumber dari dirinya maupun yang dari luar dirinya. Diantara berbagai faktor yang mempengaruhinya, penulis berpendapat bahwa, motif berprestasi, komunikasi, dan status sosial ekonomi merupakan faktor yang dominan terhadap kegiatan dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan uraian di atas maka timbul permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana partisipasi Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugas program KB Nasional ?
2. Apakah motif berprestasi mempengaruhi partisipasi Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugas program KB Nasional ?
3. Apakah komunikasi mempengaruhi partisipasi Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugas program KB Nasional ?
4. Apakah status sosial ekonomi mempengaruhi partisipasi Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugas program KB Nasional ?

Dalam penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan atau menjawab permasalahan di atas. Secara rinci ke empat variabel di atas, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Partisipasi Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugas program KB Nasional

Variabel partisipasi Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugasnya, adalah merupakan variabel dependen atau yang mendapatkan pengaruh dari variabel-variabel independen. Berdasarkan hasil observasi secara langsung terhadap Ketua Pos KB Desa, para Ketua Pos KB Desa khususnya pada daerah sampel penelitian telah berpartisipasi dalam kegiatan program KB Nasional. Partisipasi diwujudkan dalam bentuk tenaga, pikiran serta kadang-kadang materi untuk mencapai keberhasilan program KB Nasional di daerahnya. Tugas yang dikerjakan, adalah sesuai ketentuan-

ketentuan yang telah diberikan atau digariskan oleh BKKEN setempat. Walaupun intensitas maupun frekuensinya masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Tugas-tugas yang dikerjakan ini meliputi :

- a. Penerangan dan motivasi
- b. Pembinaan peserta KB Nasional
- c. Pembinaan Institusi Masyarakat (Sub Pos KB Desa, Kelompok Akseptor, Posyandu, UPPKA dan sebagainya).
- d. Rapat Koordinasi KB-Desa
- e. Minilokakarya KB-Kes/Staff meeting KB-Kes
- f. Pendataan PUS dan peserta KB
- g. Bantuan terhadap kegiatan Posyandu.

Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan ini, merupakan sub variabel dependen yang mendapatkan pengaruh dari variabel-variabel, motif berprestasi, komunikasi, dan status sosial ekonomi.

2. Motif Berprestasi

Seseorang itu berbuat atau bertingkah laku, pada dasarnya ada suatu penggerak, atau pendorong yang bersumber dari dirinya untuk mencapai sesuatu hasil dari perbuatan itu. Pada dasarnya seseorang setiap melaksanakan suatu kegiatan, baik itu tugas dirinya maupun ditugaskan orang lain, terdapat dorongan untuk berhasil dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan tersebut merupakan kepuasan tersendiri sebagai tuntutan hatinya. Dorongan seperti dikemukakan di atas adalah merupakan motif berprestasi. Jadi motif berprestasi, yaitu suatu dorongan.

untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan sebaik-baiknya, bukan karena untuk memperoleh pengakuan, tetapi karena tuntutan hati nuraninya. Menurut Mc Clelland, motif berprestasi itu dinamakan *need for achievement*, yaitu suatu daya dalam mental manusia untuk melakukan sesuatu kegiatan lebih baik, lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien dari pada kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya. Ini disebabkan virus mental. (dikutip dari, Onong Uchjana Effendy; 1983 : 64). Virus mental dimaksudkan menurut McClelland adalah, motif yang terdapat pada diri manusia yang mampu mendorong untuk berusaha lebih giat guna memperoleh sukses yang lebih besar.

Motif berprestasi seseorang ditandai dengan ciri-ciri seperti; selalu berorientasi kepada hasil yang sebaik-baiknya, mempunyai semangat kerja yang tinggi dan bekerja keras, tidak mudah menyerah, dan selalu berorientasi ke masa depan. Partisipasi Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugas program KB Nasional bersumber dari dorongan pada dirinya untuk mengerjakan suatu kegiatan yang dipercayakan pada dirinya. Kepercayaan merupakan modal bagi dirinya untuk berbuat sesuai dengan kebutuhan diri dan masyarakatnya. Sehingga akan terjadi bila tinggi atau rendahnya motif berprestasi akan mempengaruhi tinggi rendahnya suatu pekerjaan.

Berdasarkan kerangka pikiran di atas, maka motif berprestasi mempunyai pengaruh terhadap Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugasnya. Motif berprestasi tersebut merupakan variabel independen dalam penelitian ini.

3. Komunikasi

Menurut Wilbur Schramm, komunikasi dapat berlangsung paling sedikit ada tiga unsur, yaitu Sumber (source), pesan (message), dan sasaran (destination).

(Onong Uchjana Effendy; 1973 : 39). Sumber dapat merupakan perorangan atau lembaga, pesan dapat berwujud tanda-tanda tertentu, sasaran dapat berupa orang seorang, kelompok yang sedang mendengarkan atau membaca yang disampaikan komunikator.

Ketua Pos KB Desa adalah sebagai seorang komunikator yang berusaha untuk menyampaikan informasi kepada sasarannya (komunikan). Informasi merupakan bahan pokok komunikasi. Menurut pengertiannya, kata informasi berasal dari "information" yang memiliki arti cukup luas, yang mencakup antara lain (Heri Van Wering; PR : April 1989):

1. Informasi berarti berita, kabar atau pemberitahuan.
2. Informasi berarti keterangan; pernyataan, data, gambar, grafik, angka bilangan, data verbal.
3. Informasi berarti pula pernyataan-pernyataan sesuai yang dilakukan badan-badan resmi, pejabat, pengambil keputusan/kebijaksanaan.
4. Informasi juga berarti segala aktivitas yang mencakup kegiatan.

Selanjutnya Shanon dan Weaver mengatakan bahwa informasi adalah sesuatu yang mengurangi ke tidak pastian terhadap suatu situasi. (Abdilah Hanafi; 1984 : 42).

Dari beberapa definisi di atas, bahwa informasi itu pada hakekatnya merupakan kebutuhan sehari-hari manusia dalam pergaulannya baik secara individu maupun kelompok.

Salah satu syarat yang harus dimiliki komunikator adalah memiliki pengetahuan yang luas (Widjaja; 1986 : 12). Demikian pula Ketua Pos KB Desa adalah sebagai seorang komunikator, yang berarti harus mempunyai pengetahuan yang luas, khususnya program KB Nasional. Pengetahuan tersebut merupakan bahan informasi yang harus dimilikinya. Sedangkan modal dasar untuk memperoleh informasi adalah dengan cara mendengar, melihat dan membaca. Ini berarti pula komunikator harus berupaya untuk mencari informasi, yaitu untuk mengurangi ke tidak pastian terhadap program Keluarga Berencana Nasional. Disadari atau tidak dengan diperolehnya informasi yang dibutuhkan seseorang akan mendapatkan "tambahan pengetahuan". Dengan informasi yang diperolehnya akan memberikan motivasi baru untuk bergerak lebih maju, lebih tinggi dari apa yang dimiliki sebelumnya.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka informasi ini akan mempunyai pengaruh terhadap kegiatan Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugasnya. Maka dalam penelitian ini komunikasi merupakan variabel independen yang ke dua setelah motif berprestasi.

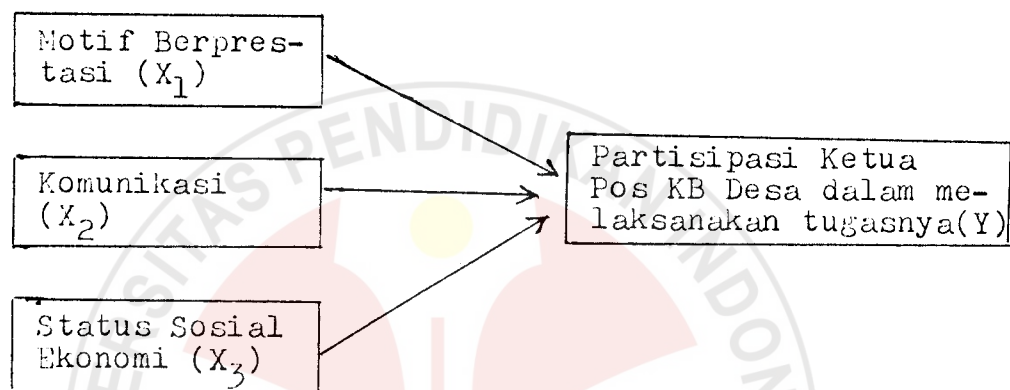
4. Status sosial ekonomi

Pada setiap masyarakat selalu dibedakan dengan stratifikasi sosialnya, karena terjadinya kelompok dan

struktur yang berbeda. Setiap kelompok masyarakat masing-masing digolongkan dalam kelompok-kelompok tertentu. Pengelompokan ini umumnya berkisar pada tingkatan umur, jenis kelamin, agama, keturunan, pendidikan dan sebagainya. Pengelompokan umumnya dapat pula didasarkan pada status sosial ekonomi. Hal ini terbagi menjadi kelas sosial ekonomi tinggi, kelas sosial ekonomi menengah dan kelas sosial ekonomi rendah. Dari masing-masing itu menjadi kelompok tersendiri. Pada setiap status sosial ekonomi tertentu menentukan pola perilaku anggotanya. Hal ini terlihat pada status sosial ekonomi tertentu menentukan aktif tidaknya dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Peranan seseorang dalam kelompok juga banyak ditentukan oleh status sosial ekonominya (Keith Davis; 1981 : 37). Selanjutnya status sosial ekonomi ditentukan oleh jenis pekerjaan, tingkat pendidikan dan penghasilan (Krech; 1962 : 313). Tingkat pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi perilakunya. Semakin tinggi pendidikan individu semakin berkembang kognisinya, dan semakin sadar terhadap situasi disekitarnya dan tingkat yang mungkin bisa dicapainya. (Krech; 1962 : 310). Tingkat kepemilikan atau kekayaan dan tingkat pendapatan mempunyai pengaruh terhadap perilaku seseorang. Semakin tinggi tingkat kekayaan atau kepemilikan dan tingkat pendapatan seseorang, maka seseorang akan lebih konsentrasi dalam mengerjakan suatu pekerjaan.

Berdasarkan penjelasan variabel tersebut, maka status sosial ekonomi ini merupakan variabel independen yang ketiga, yang mempengaruhi partisipasi Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugasnya.

Dari permasalahan penelitian di atas, yang meliputi empat variabel dalam penelitian ini. Maka paradigma penelitian ini, dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Motif berprestasi merupakan variabel bebas (X_1), komunikasi merupakan variabel bebas (X_2), dan status sosial ekonomi merupakan variabel bebas (X_3). Sedangkan variabel tidak bebas adalah partisipasi Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugasnya (Y).

Permasalahan penelitian dan paradigma penelitian selanjutnya dapat penulis rumuskan masalah penelitiannya, sebagai berikut :

1. Apakah bentuk partisipasi Ketua Pos KB Desa dalam kegiatan program KB Nasional ?
2. Apakah terdapat hubungan antara motif berprestasi dengan partisipasi Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan

kan tugas program KB Nasional ?

3. Apakah terdapat hubungan antara komunikasi dengan partisipasi Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugas program KB Nasional ?
4. Apakah terdapat hubungan antara status sosial ekonomi dengan partisipasi Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugas program KB Nasional ?

Partisipasi Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugasnya, meliputi ; penerangan dan motivasi, pembinaan peserta KB, pembinaan Institusi Masyarakat, Rakor KB Desa, Minilokakarya KB/Kes, Pendataan PUS dan peserta KB, dan bantuan terhadap kegiatan Posyandu. Motif berprestasi, meliputi aspek kognitif, afektif dan kecenderungan bertindak. Komunikasi adalah informasi tentang program KB Nasional, yaitu upaya mencari pengetahuan dan mengkomunikasikannya. Status sosial ekonomi, meliputi ; tingkat pendidikan, kepemilikan, sarana kehidupan, dan tingkat pendapatan keluarga.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, dapat dijabarkan melalui tujuan umum dan tujuan khusus penelitian.

1. Tujuan Umum Penelitian

Untuk mengetahui partisipasi Ketua Pos KB Desa dalam kegiatan program Keluarga Berencana Nasional, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya, di Kabupaten DT II Tasikmalaya dan Ciamis.

2. Tujuan Khusus Penelitian.

- a. Mengetahui bentuk partisipasi Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugas program Keluarga Berencana Nasional.
- b. Mengetahui hubungan motif berprestasi dengan Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugas program KB Nasional.
- c. Mengetahui hubungan komunikasi dengan Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugas program KB Nasional.
- d. Mengetahui hubungan antara status sosial ekonomi dengan Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugas program KB Nasional.

D. Kegunaan Penelitian.

Di dalam penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan yang nyata baik secara teoritis menggali konsep-konsep Pendidikan Luar Sekolah, maupun secara praktis, yakni sebagai sumbangan terhadap program pembangunan yang sedang dilaksanakan.

1. Secara teoritis

- a. Kegunaan penelitian ini diharapkan memperkaya dan mengembangkan konsep-konsep atau teori-teori yang telah dimiliki oleh Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- b. Memberikan informasi tentang pengembangan Pendidikan Luar Sekolah yang terdapat di lapangan.
- c. Memberikan sumbangan pikiran mengenai konsep-konsep Pendidikan Luar Sekolah yang berkaitan dengan program KB Nasional di lapangan.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan merupakan masukan bagi pengembangan kebijaksanaan program KB Nasional.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi BKKBN untuk merencanakan kegiatan, khususnya dalam pembinaan dan pengembangan Instansi Masyarakat (Pos KB Desa) di lapangan.
- c. Hasil penelitian ini merupakan sumbangan langsung bagi para pengelola dan pelaksana program KB Nasional di lapangan, sehingga akan menambah wawasan lebih luas dalam melestarikan program KB Nasional menuju mandiri.

E. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini yang berjudul, "Partisipasi Ketua Pos KB Desa dalam kegiatan program Keluarga Berencana Nasional". Dengan sub judul, suatu studi deskriptif tentang partisipasi ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugasnya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan judul tersebut mengungkapkan, pertama partisipasi Ketua Pos KB Desa; kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, adalah motif berprestasi, komunikasi dan status sosial ekonomi.

Sampel dalam penelitian ini diambil hanya 100 orang Ketua Pos KB Desa yang aktif, pada 10 kecamatan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu yang tersedia.

Demikian pula instrumen pengumpulan data, dalam variabel dependen hanya mengungkapkan, dilaksanakan atau tidak, alasan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, frekuensi, serta jumlah jam yang digunakan. Instrumen variabel independen, hanya mengungkapkan apa adanya sesuai dengan pertanyaan yang ada, artinya tidak menggali lebih dalam, tetapi secara deskriptif. Analisis untuk hubungan variabel menggunakan statistik non parametrik dengan rumus chi-kuadrat dari buku Sudjana (1988), dan Yule's Q dari buku Koentjaraningrat (1983). Dengan keterbatasan penelitian ini disarankan untuk diadakan penelitian yang mendalam mengenai Ketua Pos KB Desa ini. Harapan penulis sekalipun dengan sangat terbatas ini, semoga ada manfaatnya, khususnya bagi perkembangan konsep Pendidikan Luar Sekolah, dan program KB Nasional di lapangan.

